

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan dari pemerintahan Presiden Prabowo, kebijakan ini digagas saat masa kampanye pemilihan Presiden tahun 2024. Program ini menjadi bagian dari strategi besar untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul sejak usia dini. Selain itu, program ini juga ditujukan untuk memberikan makanan yang sehat dan bergizi secara gratis kepada sasaran penerima manfaat, sebagai langkah konkret dalam menurunkan angka stunting, memperbaiki status gizi anak, dan memperkuat pertahanan nasional melalui generasi muda yang sehat dan cerdas. Pelaksanaan program ini juga melibatkan UMKM sebagai pemasok bahan pangan untuk memicu pertumbuhan ekonomi mikro di tingkat lokal. Salah satu hal penting dalam implementasi makan bergizi gratis yaitu sistem pendistribusiannya. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian lain yang menunjukkan bahwa distribusi yang tidak efisien akan berujung pada makanan yang rusak, keterlambatan, maupun ketidaktepatan sasaran.¹

Kebijakan makan bergizi gratis mempunyai peluang untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi anak-anak dalam akses makan bergizi yang tentunya akan berdampak pada pengurangan ketimpangan sosial, anak-anak dari kalangan yang kurang mampu akan berkesempatan sama dengan anak-anak dari kalangan keluarga yang mampu dalam hal kualitas makanan yang dikonsumsi, sehingga tentu akan berdampak pada kualitas

¹ Rahma Wijayanti and others, 'Sistem Distribusi MBG Di SMP Falatehan Contoh Praktik Pembelajaran Sistem Kolaborasi Yang Efektif Di Sekolah', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4.1 (2025), 1234–41.

perkembangan anak-anak di Indonesia secara merata dan dapat menjadi investasi sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang. Pemerintah pusat memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, dimana kebijakan strategis yang diambil dalam hal perencanaan sampai dengan pendistribusian akan menentukan keberhasilan dalam program ini. Begitu juga dengan Pemerintah daerah selaku institusi tingkat lokal, juga mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memastikan distribusi makanan bergizi gratis dapat tersalurkan secara merata dan tepat sasaran. Selain itu, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Dukungan sosial ini memperkuat kontrol dan pengawasan publik terhadap jalannya program, sekaligus menumbuhkan rasa kepemilikan bersama terhadap upaya peningkatan gizi anak bangsa.

Implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dilaksanakan oleh Pemerintah di berbagai daerah tidak terlepas dari sejumlah tantangan dan faktor penghambat. Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Tulungagung yang mendukung kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) beberapa kali menghadapi persoalan serius berupa kasus keracunan massal. Insiden keracunan massal yang menimpa 68 siswa SMPN 1 Boyolangu dan SDN 1 Tanggung pada Oktober 2025 menjadi pukulan besar. Setelah mengkonsumsi makanan dari dapur SPPG, siswa mengalami keracunan massal. Dinas Kesehatan Tulungagung segera menutup dapur SPPG Desa Tanggung dan mengirim sampel makanan ke laboratorium untuk memastikan sumber kontaminasi. Selain itu, sekolah diingatkan agar lebih waspada dan berhak menolak

makanan yang tercium basi, sebagai langkah pengawasan garda terdepan demi mencegah kejadian serupa.²

Namun, insiden di Desa Tanggung bukanlah satu-satunya kasus keracunan dalam program MBG di Tulungagung. Beberapa bulan kemudian, kejadian serupa kembali mencuat di Desa Moyoketen, Kecamatan Boyolangu, yang menimpa siswa SMK Sore Tulungagung. Pada Januari 2026, sembilan siswa SMK Sore Tulungagung mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG dari dapur SPPG Desa Moyoketen. Gejala berupa gangguan pencernaan yang membuat mereka harus dirawat di Puskesmas Beji. Pemerintah Kabupaten Tulungagung bersama Satgas MBG segera menghentikan operasional dapur tersebut dan melakukan pemeriksaan kebersihan secara ketat. Temuan penting meliputi kondisi lingkungan yang kurang higienis, produk makanan tanpa label halal dan tanpa tanggal kedaluwarsa, serta penggunaan roti tanpa merek. Satgas menekankan perlunya peningkatan kebersihan, pemakaian produk lokal, dan kepatuhan terhadap standar pangan sebelum dapur dapat kembali beroperasi.³

Situasi ini memperkuat bukti mengenai pola berulang yang terjadi, karena tidak lama setelah kasus di Moyoketen, keracunan kembali terjadi di SDN 3 Bungur. Peristiwa tersebut bahkan mendorong Badan Gizi Nasional untuk mengambil langkah lebih tegas dengan menghentikan sementara empat dapur SPPG sekaligus. Kasus keracunan yang menimpa 24 siswa SDN 3 Bungur pada Februari 2026 semakin memperburuk citra program MBG di Tulungagung. Menu yang disajikan berupa nasi putih, ayam suwir, tahu,

² AJTTV, "Darurat Gizi Gratis: Puluhan Siswa di Tulungagung Keracunan Massal, Dapur SPPG Langsung Ditutup," *AJTTV.com*, 15 Oktober 2025, diakses 5 Maret 2026, <https://ajttv.com/darurat-gizi-gratis-puluhan-siswa-di-tulungagung-keracunan-massal-dapur-sppg-langsung-ditutup>

³ Kompas, "9 Siswa di Tulungagung Keracunan, Operasi Dapur SPPG Dihentikan," *Kompas.com*, 23 Januari 2026, diakses 5 Maret 2026, <https://surabaya.kompas.com/read/2026/01/23/160934178/9-siswa-di-tulungagung-keracunan-operasi-dapur-sppg-dihentikan>

oseng kacang, dan kurma, dengan dugaan ayam suwir sebagai pemicu karena ditemukan berbau dan berlendir. Badan Gizi Nasional (BGN) segera menghentikan sementara empat dapur SPPG yang belum memiliki *Sertifikat Laik Higiene Sanitasi* (SLHS), serta menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap standar keamanan pangan. BGN juga mengingatkan bahwa beberapa menu seperti nasi kuning, capcay, dan ayam suwir rawan cepat rusak sehingga tidak direkomendasikan. Langkah ini diambil untuk memastikan keselamatan siswa tetap menjadi prioritas utama.⁴

Rangkaian kasus keracunan di Tulungagung menunjukkan bahwa masalah kebersihan, pemilihan menu yang cepat rusak, serta lemahnya pengawasan bukan hanya terjadi di dapur penyedia, tetapi juga dalam rantai pendistribusian makanan bergizi gratis ke sekolah-sekolah. Proses distribusi yang tidak disertai kontrol kualitas ketat membuat makanan berisiko mengalami penurunan mutu sebelum dikonsumsi siswa. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap standar hygiene, sanitasi, dan sistem distribusi MBG menjadi kebutuhan mendesak agar program ini benar-benar aman, layak, dan bermanfaat bagi kesehatan peserta didik. Hambatan lain yang cukup besar adalah juknis MBG yang sering berubah-ubah, sehingga SPPG di berbagai daerah harus terus menyesuaikan sistem manajemen dan pelaksanaan, jika tidak segera diikuti dengan koordinasi dan adaptasi yang cepat, bisa menimbulkan ketidaksesuaian antara juknis terbaru dan pelaksanaan di

⁴ Info Indonesia, "Kasus Keracunan MBG di Tulungagung: Empat Dapur SPPG Dihentikan Sementara," *InfoIndonesia.id*, Februari 2026, diakses 5 Maret 2026, <https://www.infoindonesia.id/info-daerah/96116716938/kasus-keracunan-mbg-di-tulungagung-empat-dapur-sppg-dihentikan-sementara>

lapangan.⁵ Padahal, urgensi program ini sangat tinggi karena masalah gizi terbukti berpengaruh pada tumbuh kembang dan prestasi belajar anak.⁶

Berdasarkan laporan FAO (2022), sekitar 45 juta anak di seluruh dunia mengalami malnutrisi yang tentunya akan berdampak langsung pada performa akademik dan pertumbuhan fisik mereka. Di Indonesia, masalah stunting dan gizi buruk masih menjadi tantangan besar di ranah Pendidikan. Data dari kesehatan republik Indonesia (2023) menunjukkan bahwa angka stunting nasional mencapai 21,6% yang berpengaruh pada kemampuan anak dalam menyerap materi pelajaran. Berbagai studi telah membuktikan bahwa pemberian gizi secara rutin di sekolah dapat meningkatkan kesehatan anak dan dapat berdampak positif terhadap pendidikan mereka. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Bundy et al (2018), adanya makan gratis di sekolah terbukti mampu meningkatkan kehadiran siswa hingga 9% serta berdampak positif terhadap prestasi akademik mereka. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas program gizi sekolah dapat menjadi landasan penting bagi penelitian ini untuk menyoroti implementasi di tingkat lokal. Atas dasar itu, pemilihan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Boyolangu sebagai lokasi studi kasus dilakukan dengan pertimbangan strategis yang relevan dengan kebutuhan penelitian, serta diperkuat oleh data representatif mengenai implementasi program di tingkat lokal.

SPPG Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, telah melalui proses verifikasi dan validasi oleh tim Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta pada 10

⁵ Firre An Suprpto, Editha Praditya, Reffi Marizka Dewi, Wignyo Adiyoso, 'A Policy Implementation Review of the Free Nutritious Meal (MBG) Program', *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 6.2 (2025).

⁶ Hidayat Sahida, Asri Adisasmic, 'Hubungan Status Gizi dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas 1–3 Sekolah Dasar', *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Indonesia*, 5.2 (2021).

Januari 2025, dan secara resmi dinyatakan siap beroperasi serentak (*national running program*) pada 13 Januari 2025. Selain memperoleh status verifikasi nasional, SPPG Desa Beji juga termasuk salah satu dari tiga lokasi awal program percontohan di Kabupaten Tulungagung, bersama SPPG Kalidawir yang beroperasi di wilayah 3T dan SPPG Al Azhar yang berada dalam lingkup pondok pesantren. Lokasi Boyolangu dinilai strategis karena berdekatan dengan sekolah-sekolah umum, sehingga menjadi model representatif untuk menguji mekanisme distribusi di kawasan perkotaan dan semi perkotaan.⁷

Melalui Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 yang merupakan revisi kedua atas petunjuk teknis sebelumnya, menunjukkan bahwa regulasi dalam program ini bersifat dinamis dan adaptif terhadap kondisi lapangan. Perubahan regulasi ini dapat dipicu oleh berbagai kendala teknis, seperti keterlambatan distribusi, ketidaksesuaian antara jumlah kebutuhan dan pemasokan bahan, serta tantangan koordinasi antar lembaga pelaksana. Perubahan regulasi yang tidak diikuti sosialisasi, dapat menimbulkan ketidaksesuaian di lapangan.⁸

Menurut Prof. Dr. Eko Prasajo, Guru Besar Administrasi Publik Universitas Indonesia, “Kebijakan publik yang baik harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan masyarakat, namun tetap menjaga konsistensi implementasi di lapangan”.⁹ Pendapat ini menegaskan bahwa fleksibilitas regulasi harus diimbangi dengan kesiapan teknis dan sumber daya manusia agar kebijakan tidak hanya responsif, tetapi juga efektif. Senada dengan itu, Prof. Dr. M. Quraish Shihab dalam kajian

⁷ Pambuko Arinda, Kepala SPPG Desa Beji, *Wawancara Pra-penelitian*, SPPG Desa Beji, 4 Desember 2025

⁸ Badan Pangan Nasional, ‘Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan’, *Jakarta: Bapanas*, 2025.

⁹ Eko Prasajo, ‘Reformasi Kebijakan Publik di Indonesia: Tantangan dan Strategi Implementasi’, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 23.2 (2016), 85–94.

fikih siyasah menyatakan bahwa “Keputusan pemimpin dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan dan keadilan, serta mempertimbangkan kondisi nyata Masyarakat”.¹⁰ Artinya, perubahan kebijakan seperti revisi juknis Badan Gizi Nasional harus tetap berpijak pada nilai-nilai moral dan sosial agar pelaksanaannya tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermanfaat dan adil bagi masyarakat luas. Dengan mengacu pada pandangan para ahli tersebut, jelas bahwa penelitian ini penting untuk mengkaji kesesuaian antara regulasi yang terus berkembang dan realitas pelaksanaan di lapangan, sekaligus memastikan bahwa kebijakan publik yang dijalankan benar-benar berorientasi pada kemaslahatan dan pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Topik mengenai pelaksanaan distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) layak dikembangkan menjadi bahan penelitian skripsi karena adanya dinamika regulasi yang terus berubah dan berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan di lapangan. Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 63 Tahun 2025, yang merupakan revisi kedua dari petunjuk teknis sebelumnya, mencerminkan sifat kebijakan yang responsif terhadap tantangan teknis seperti keterlambatan distribusi, ketidaksesuaian menu dengan kebutuhan anak, serta koordinasi antar lembaga pelaksana. Namun, frekuensi perubahan regulasi yang cepat seringkali tidak diikuti dengan sosialisasi dan pelatihan memadai, sehingga menimbulkan kesenjangan antara kebijakan pusat dan implementasi daerah.

Analisis dari *The Indonesian Institute* menegaskan bahwa perubahan regulasi tanpa pembaruan sistem koordinasi dapat berakibat pada ketidaktepatan sasaran distribusi

¹⁰ M. Quraish Shihab, ‘Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat’, *Bandung: Mizan*, 1996, hlm. 567.

makanan bergizi.¹¹ Senada dengan itu, data KPAI menunjukkan adanya kendala berupa keterlambatan distribusi, kualitas menu yang kurang sesuai, serta lemahnya pengawasan terhadap standar keamanan pangan.¹² Dengan demikian, studi mengenai “Implementasi Pendistribusian Makan Bergizi Gratis Perspektif Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 63 Tahun 2025 dan Fikih Siyasah” memiliki signifikansi penting untuk memahami bagaimana mekanisme distribusi program MBG dijalankan di tingkat lokal, sekaligus menilai kesesuaian praktik tersebut dengan juknis yang terus mengalami perubahan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan dasar empiris bagi analisis akademik mengenai prinsip *maslahah* dan keadilan dalam bingkai Fikih Siyasah, sehingga kebijakan publik yang dijalankan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga benar-benar berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi distribusi bantuan pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025 di SPPG Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pelaksanaan distribusi bantuan Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Desa Beji dalam perspektif fikih siyasah?

¹¹ The Indonesian Institute, ‘Policy Assessment 2025: Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Sebagai Strategi Penurunan Stunting di Indonesia’, *Jakarta: The Indonesian Institute*, 2025, hlm. 12–15.

¹² Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), ‘KPAI Soroti Kendala dalam Program Makanan Bergizi Gratis, Tegaskan Pentingnya Pengawasan dan Koordinasi’, *Jakarta: KPAI*, 24 Januari 2025.

3. Bagaimanakah bentuk kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan distribusi bantuan Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Desa Beji?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi distribusi bantuan pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025 di SPPG Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mengetahui implementasi distribusi bantuan Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Desa Beji dalam perspektif fikih siyasah
3. Untuk mengetahui bentuk kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan distribusi bantuan Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Desa Beji

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penguatan Teori Implementasi Kebijakan: Penelitian ini memperkuat teori implementasi kebijakan dengan mengkaji bagaimana Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025 dijalankan di tingkat lokal, khususnya di SPPG Desa Beji, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas distribusi bantuan Program Makan Bergizi Gratis.
 - b. Pengembangan Kajian Fikih Siyasah: Studi ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan fikih siyasah kontemporer dengan menganalisis pelaksanaan distribusi bantuan pemerintah melalui perspektif hukum Islam, sehingga

memperluas pemahaman tentang prinsip keadilan dan amanah dalam konteks kebijakan publik.

- c. Integrasi antara Ilmu Keislaman dan Ilmu Sosial: Penelitian ini menjadi jembatan antara pendekatan normatif Islam dan pendekatan empiris ilmu sosial, menunjukkan bahwa analisis kebijakan publik dapat diperkaya dengan nilai-nilai keislaman yang relevan dengan masyarakat Indonesia.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi SPPG Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung: Penelitian ini memberikan masukan konkret untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas distribusi bantuan makan bergizi, serta memastikan pelaksanaannya sesuai dengan Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025.
 - b. Bagi Masyarakat Penerima Manfaat: Memberikan wawasan kepada masyarakat agar memahami hak mereka atas bantuan, serta berperan aktif dalam mengawasi distribusi agar berjalan adil, transparan, dan tepat sasaran.
 - c. Bagi Peneliti Selanjutnya: menjadi referensi dan pijakan untuk penelitian lanjutan dalam mengkaji distribusi bantuan sosial berbasis regulasi dan fikih siyasah. Peneliti berikutnya bisa memperluas kajian ke daerah lain atau mendalami aspek keislaman dalam kebijakan publik secara lebih mendalam.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka beberapa istilah penting perlu ditegaskan sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi merupakan tahap krusial yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam menjangkau sasaran yang telah ditetapkan.¹³ Dalam konteks penelitian ini, istilah *implementasi* merujuk pada proses pelaksanaan suatu kebijakan atau program yang telah dirumuskan oleh pemerintah, khususnya berkaitan dengan penyaluran bantuan makan bergizi gratis. Implementasi mencakup tahapan-tahapan konkret yang dilakukan oleh pihak pelaksana di lapangan, mulai dari perencanaan teknis, koordinasi antar instansi, hingga distribusi bantuan kepada penerima manfaat. Penegasan ini penting untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar fokus pada aspek pelaksanaan, bukan pada perumusan kebijakan atau evaluasi dampaknya secara menyeluruh.

2. Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 63 Tahun 2025

Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025 merupakan regulasi resmi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025. Keputusan ini memuat perubahan kedua atas petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan pemerintah, yang mencakup ketentuan mengenai sasaran penerima, mekanisme distribusi, serta tanggung jawab lembaga pelaksana. Penegasan terhadap dokumen ini diperlukan agar pembaca memahami bahwa penelitian ini berlandaskan pada kebijakan yang spesifik dan aktual. Dalam konteks penelitian, keputusan ini menjadi acuan utama dalam

¹³ Nor Effendi, Akhmad Berkatillah, and Selamat Riadi, 'Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Pada Desa Matang Lurus Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan', *Jurnal Kebijakan Publik*, 2.60 (2025), 1-11.

menganalisis kesesuaian antara pelaksanaan program di lapangan dengan ketentuan normatif yang telah ditetapkan oleh pemerintah.¹⁴

3. Fikih Siyasah

Fikih siyasah merupakan cabang ilmu fikih yang membahas prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan dan kebijakan publik dalam perspektif Islam.¹⁵ Dalam penelitian ini, fikih siyasah digunakan sebagai kerangka normatif untuk menilai pelaksanaan distribusi bantuan makan bergizi gratis, dengan menitikberatkan pada nilai-nilai keadilan (*al-adl*), amanah (*al-amānah*), dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*). Penegasan istilah ini penting karena pendekatan fikih siyasah memberikan dimensi etis dan religius dalam menganalisis kebijakan publik, sehingga memperkaya sudut pandang penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi, penulis akan membagi menjadi 6 bab dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, Adapun penulisan sistematikanya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian (teoritis dan praktis), serta penegasan istilah.

BAB II Kajian Teori, bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dengan penelitian, meliputi teori implementasi kebijakan publik, kebijakan program makan bergizi

¹⁴ Nyi Raden Ruyani and others, 'Di Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani', 4 (2023).

¹⁵ Andi Ariani Hidayat and others, 'Implementasi Hukum Islam Dalam Masyarakat Indonesia (Pendekatan Sosiologi Hukum) Qadriani Arifuddin, 1989, 725–38.

gratis, fikih siyasah, serta hak anak dan peran negara. Selain itu, dibahas juga penelitian terdahulu yang mendukung topik penelitian, serta kerangka teoritik yang menjadi dasar analisis.

BAB III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, teknik analisis data, serta prosedur pelaksanaan penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, bab ini memaparkan hasil temuan penelitian berdasarkan wawancara dan observasi terhadap implementasi distribusi Makan Bergizi Gratis di SPPG Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung.

BAB V Pembahasan, bab ini memaparkan pembahasan hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori, serta dengan pendapat para ahli. Hasil penelitian yang dibahas di bab sebelumnya, bersama dengan teori atau pendapat yang diungkapkan, dapat memeperkuat hubungan, atau mungkin bertentangan dan menunjukkan perbedaan.

BAB VI Penutup, bab ini berisi Kesimpulan dari penelitian serta saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, yaitu SPPG Desa Beji, masyarakat penerima manfaat, serta bagi peneliti selanjutnya.